BAB II

Landasan Teori

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, istilah jual beli bersumber dari bahasa Arab, yaitu *al-Bai'*, kata dengan arti menjual atau mengganti sesuatu. Wahbah al-Zuhaily mendefinisikan konsep ini sebagai proses pertukaran suatu barang atau benda dengan barang lainnya. Sementara itu, dalam ranah terminologi, para ulama fiqh memiliki berbagai pendapat mengenai pengertian jual beli. Salah satu di antaranya, Sayyid Sabiq, menjelaskan bahwa jual beli ialah transaksi pertukaran harta dengan harta lainnya yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Dalam perspektif ini, jual beli pun berarti sarana pemindahan hak kepemilikan barang dengan adanya imbalan atau pengganti dengan kesepakatan kedua pihak yang bertransaksi.¹²

Jual beli termasuk satu dari berbagai cara yang diperbolehkan oleh Islam untuk mencari rezeki. Secara hukum, aktivitas jual beli pada dasarnya diperbolehkan atau bersifat mubah, yang berarti setiap muslim memiliki kebebasan untuk mencari nafkah melalui transaksi perdagangan ataupun cara lain yang halal. Namun, jika memilih jalur jual beli, maka ada kewajiban untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang telah dijelaskan di Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, praktik jual beli sepatutnya menggunakan cara yang jujur

¹² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), 91.

dan adil, serta menghindari segala bentuk kecurangan, seperti penipuan, kebohongan, kecurangan dalam timbangan, praktik riba, dan berbagai transaksi yang diharamkan lainnya. Dengan menjalankan jual beli yang halal, seseorang dapat memperoleh keuntungan materi dan mendapatkan keberkahan dalam usahanya.¹³

Allah SWT mengajarkan dengan firman-nya

وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (٢٧٥)

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al Baqarah : 275).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada asal hukumnya jual beli adalah boleh.¹⁴ diperebolehkannya jual beli beedasar pada ayat dalam al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’:

a. Al Qur’an

Surat Al-Baqarah Ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah.”¹⁵

¹³ Siti Choiriyah, *Mu’amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Sukoharjo: Center For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 18.

¹⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 3.

¹⁵ QS. Al-Baqarah (2) : 188.

b. Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’ RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya : “apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim)”.

c. Ijma’

Para ulama, khususnya mereka yang ahli dalam bidang fiqih, telah mencapai kesepakatan (*ijma'*) bahwa jual-beli merupakan aktivitas yang sah dan diperbolehkan dalam Islam. Dari berbagai cara mencari rezeki, perdagangan tidak hanya dianggap halal, tetapi juga dapat menjadi sumber keberkahan jika dilakukan dengan cara yang jujur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya kesepakatan ini, umat Islam didorong untuk menjalankan transaksi jual-beli dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan, sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya bermanfaat secara materi, tetapi juga mendapat ridha Allah SWT.¹⁶

Jual beli pada dasarnya merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam hukum Islam, atau dengan kata lain,

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

hukumnya adalah *jaiz* (boleh). Namun, status hukum jual beli tersebut dapat berubah dalam keadaan tertentu. Perubahan ini sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam aturan jual beli. Jika seluruh syarat dan rukun terpenuhi, maka transaksi jual beli tetap sah dan diperbolehkan. Sebaliknya, jika terdapat pelanggaran atau kekurangan dalam syarat maupun rukun tersebut, maka status jual beli bisa berubah menjadi tidak sah, terlarang, atau bahkan batal, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Sebab itu penting untuk setiap pelaku usaha atau individu yang melakukan transaksi jual beli untuk memahami dan memastikan bahwa setiap akad yang dilakukan telah memenuhi ketentuan yang berlaku agar tetap berada dalam koridor yang dibenarkan oleh hukum.¹⁷

3. Syarat dan rukun Jual Beli

Dasar penetapan rukun jual beli oleh para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ulama dari mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun utama dalam jual beli adalah *ijab* dan *qabul*, yang menandakan adanya perjanjian antara penjual dan pembeli guna melaksanakan pertukaran barang dengan penuh kerelaan. Kesepakatan ini dapat dinyatakan baik melalui ucapan maupun tindakan yang menunjukkan persetujuan. Sementara itu, mayoritas ulama atau *jumhur*

¹⁷ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), 130.

memiliki pandangan berbeda, di mana mereka menetapkan bahwa rukun jual beli terdiri dari empat elemen utama.¹⁸ yaitu:

a. Akad (*ijab qabul*),

Akad dalam bahasa secara harfiah memiliki arti suatu hubungan untuk menghubungkan antara satu ujung dengan ujung lainnya pada suatu benda. Sementara itu, dalam terminologi ilmu fikih, akad merujuk pada perjanjian atau kesepakatan yang terjadi antara dua pihak melalui proses *ijab* dan *qabul* sejalan dengan syariat Islam. Akad ini dilakukan dengan tata cara yang telah ditetapkan dalam hukum Islam sehingga menimbulkan dampak hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak yang berakad.

b. Orang yang berakad (subjek)

Dalam suatu transaksi jual beli, terdiri dari dua pihak utama yang terlibat, yaitu *al-Bai'* sebagai penjual dan *mustari* sebagai pembeli. Kedua pihak ini dikenal sebagai *aqid*, yaitu individu yang secara langsung menjalankan akad atau perjanjian dalam transaksi tersebut. Keberadaan kedua pihak ini menjadi syarat mutlak dalam jual beli, karena tanpa adanya penjual dan pembeli, transaksi tidak akan dapat berlangsung. Selain itu, individu yang terlibat dalam jual beli harus memenuhi persyaratan tertentu agar transaksi dapat dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

¹⁸ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 46.

- a) Beragama Islam, Dalam transaksi jual beli, pihak yang terlibat adalah seorang Muslim. Namun, ketentuan ini hanya menjadi syarat khusus bagi pembeli dalam jenis barang tertentu. Dengan kata lain, tidak semua transaksi mengharuskan kedua belah pihak beragama Islam, tetapi dalam kasus tertentu, pembeli wajib beragama Islam untuk memenuhi syarat sahnya jual beli tersebut. Hal ini biasanya berlaku pada barang-barang yang memiliki nilai ibadah atau berkaitan erat dengan ajaran agama Islam.
- b) Berakal, Orang yang berakal adalah individu yang memiliki kemampuan untuk membedakan serta memilih hal-hal yang bermanfaat dan terbaik bagi dirinya. Dengan kecerdasan dan pemikiran yang jernih, ia dapat menilai suatu keadaan secara objektif, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan, serta mengambil keputusan yang tepat. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk tidak hanya memahami mana yang baik dan buruk, tetapi juga menerapkan kebijaksanaan di kehidupan sehari-hari agar tercapainya kemakmuran dan keberhasilan.
- c) Kehendaknya sendiri, Seseorang harus bertindak atas kehendaknya sendiri dalam melakukan transaksi jual beli, yang berarti bahwa keputusan untuk menjual atau membeli suatu barang dilakukan dengan tidak ada intimidasi dari pihak mana pun. Kebebasan dalam menentukan pilihan ini menjadi

aspek penting dalam transaksi yang adil, di mana setiap pihak memiliki hak untuk mempertimbangkan keuntungan, kerugian, serta kesesuaian dengan kebutuhannya sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, suatu transaksi jual beli yang sah haruslah didasarkan pada kesadaran dan kerelaan dari masing-masing pihak tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak lain.

- d) Baligh, Baligh dalam hukum Islam merupakan tanda bahwa telah dicapainya kedewasaan dan bertanggung jawab atas segala perbuatan serta kewajibannya sebagai seorang Muslim. Bagi laki-laki, status baligh ditandai dengan mimpi basah atau ketika telah mencapai usia 15 tahun. Sementara itu, bagi perempuan, tanda baligh umumnya ditandai dengan datangnya haid. Ketika seseorang telah baligh, ia mulai dikenai kewajiban menjalankan perintah agama, seperti shalat, puasa, dan berbagai ketentuan syariat lainnya. Status ini juga menandakan bahwa individu tersebut memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan keagamaan dalam kehidupannya.
- e) Keduanya tidak mubadzir, pihak-pihak yang memiliki peran dalam perjanjian jual beli tidak dianjurkan individu yang bertindak boros atau menghambur-hamburkan harta secara sia-sia. Dengan kata lain, mereka adalah individu yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola keuangan mereka. Dalam transaksi jual beli, terdapat syarat yang wajib ditaati

oleh pihak yang menjalankan akad, salah satunya adalah beragama Islam. Namun, ketentuan ini hanya berlaku bagi pembeli dalam kasus tertentu, terutama ketika menyangkut benda-benda tertentu yang memiliki nilai atau aturan khusus dalam hukum Islam.

Keduanya tidak mubadzir yang dimaksud memiliki pengertian keduanya dalam perjanjian jual beli ini tidaklah individu yang bertindak secara boros atau menghamburkan sumber daya secara sia-sia. Dengan kata lain, mereka menjalankan transaksi dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada kebutuhan dan manfaat yang jelas. Prinsip ini mencerminkan sikap bijaksana dalam mengelola keuangan serta menegaskan bahwa perjanjian yang mereka buat didasari oleh kesepakatan yang saling menguntungkan, tanpa ada unsur pemborosan atau ketidakefisienan dalam penggunaannya.

- c. Untuk suatu jual beli dianggap sah, harus ada *ma' kud alaih*, yaitu barang yang menjadi dasar perjanjian atau objek transaksi.
- d. Keberadaan nilai tukar sebagai pengganti barang merupakan sesuatu yang memenuhi tiga kriteria penting: mampu menyimpan nilai, dapat digunakan untuk menilai atau menentukan harga suatu barang, serta berfungsi sebagai media pertukaran.¹⁹

¹⁹ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). 132.

Sebuah transaksi jual-beli dianggap sah apabila memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Terdapat dua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.
- b. Ada barang atau objek yang diserahkan untuk pembeli dari penjual.
- c. Terdapat pernyataan yang menunjukkan kesepakatan dalam transaksi jual-beli (*sighat ijab qabul*).²⁰

4. Macam-macam Jual Beli

Transaksi jual beli dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, termasuk perspektif hukum Islam yang mengatur tentang barang yang diperdagangkan. Menurut prinsip hukum Islam, transaksi jual beli dikategorikan menjadi dua, yaitu yang dianggap sah dan yang tidak sah. Di samping itu, ada pula jenis jual beli yang dapat dibatalkan atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap.²¹ yaitu:

- a. Transaksi perdagangan yang diharamkan dalam Islam telah dijelaskan melalui sabda Rasulullah Saw. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a., Nabi Muhammad Saw. menyampaikan bahwa Allah dan Rasul-Nya telah melarang perdagangan minuman keras, bangkai, daging babi, serta patung berhala (HR Bukhari dan Muslim).

- b. Menjual sperma hewan dianggap diperbolehkan dalam Islam.

Menurut hukum Islam, diperkenankan untuk menjual daging

²⁰ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), 45.

²¹ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). 133.

- kambing yang belum dikuliti berdasarkan beratnya. Selain itu, menjual ayam yang sudah disembelih dengan kotoran yang masih ada di dalam perutnya juga diizinkan.
- c. Jual beli menggunakan perantara (*al-wasilat*) berarti melakukan pemesanan barang menggunakan akad jual beli yang belum sepenuhnya dibayar, namun pembeli tiba-tiba membatalkan kesepakatan tersebut. Sebagian besar ulama menetapkan bahwa hukum jual beli semacam ini boleh asalkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu agar barang tersebut tidak dibeli oleh orang lain.
 - d. Menjual atau membeli anak hewan yang masih berada di dalam kandungan induknya tidak diperbolehkan karena barang tersebut belum ada secara nyata.
 - e. Jual beli *muhaqallah* atau *baqallah* pada sawah, kebun, dan tanah merujuk pada transaksi yang melibatkan tumbuhan yang masih berada di ladang atau sawah dan belum memiliki kepastian bentuknya. Karena ketidakjelasan tersebut, jual beli ini dapat menimbulkan ketidaksepakatan dari pihak pembeli atau penyesalan dari penjual. Oleh karena itu, transaksi semacam ini dikategorikan sebagai jual beli *gharar*.
 - f. Jual beli *mukhadharah*, ialah transaksi penjualan buah-buahan yang belum layak panen, tidak diperbolehkan sebab masih mengandung ketidakpastian. Hal ini disebabkan resiko buah itu

- jatuh terkena angin sebelum dipanen oleh pembeli, membusuk, atau resiko kerusakan lainnya.
- g. Jual beli *muammasah* adalah transaksi jual beli di mana seseorang harus membeli kain yang disentuhnya saat kain tersebut sedang dipajang.
 - h. *Munabadzah* adalah jenis jual beli di mana barang diperjualbelikan dengan cara lempar melempar. Konsep ini mirip dengan lelang, di mana penawar dengan harga tertinggi berhak mendapatkan barang tersebut. Namun, metode ini dikhawatirkan dapat menimbulkan risiko penipuan.
 - i. Jual beli *muzaabanah* adalah transaksi di mana barang basah dan kering diperjualbelikan secara bersamaan. Dalam praktiknya, pencampuran kedua jenis barang ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam nilai atau ukuran barang yang diperdagangkan.

5. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Supaya terhindar kerugian bagi salah satu pihak, akad jual beli harus dijalankan dengan jujur, tanpa adanya paksaan, penipuan, kesalahan, atau perbuatan lainnya yang beresiko menimbulkan perselisihan, kekecewaan, maupun penyesalan. Oleh karena itu, masing-masing pihak wajib menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, seperti penjual memberikan barang yang dijual, sementara pembeli membayar dengan uang sesuai kesepakatan. Selain itu, pencatatan transaksi juga perlu dilakukan agar proses jual beli lebih

transparan untuk meminimalisir terjadinya masalah di kemudian hari.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q. S al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ

كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۖ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya.*

Pada ayat tersebut, dapat dipahami bahwa baik penjual maupun pembeli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.²² Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang secara khusus membahas tentang pentingnya pencatatan dalam transaksi utang piutang. Ayat ini tidak hanya relevan dalam konteks utang, tetapi juga dapat dijadikan pedoman transaksi jual beli secara umum. Dalam ayat ini, Allah SWT. Memerintahkan agar setiap transaksi yang mengandung penundaan pembayaran, seperti jual beli tidak tunai atau kredit, harus dicatat secara jelas dan disaksikan oleh pihak lain. Hal ini bertujuan untuk menjaga kejelasan akad dan menghindari perselisihan di kemudian hari.²³

Dalam konteks jual beli ayat ini menekankan pentingnya transparansi dan keadilan antara penjual dan pembeli. Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan dalam

²² Ismail Pane, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022). 137.

²³ Ahmad Rifai, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: LkiS, 2024), 46.

waktu yang telah ditentukan, sedangkan pembeli berkewajiban untuk menunaikan pembayaran secara jujur dan tepat waktu. Ketika pencatatan dilakukan, maka hak penjual atas pembayarannya menjadi terlindungi secara administratif dan moral, sementara pembeli pun terlindungi dari tuntutan yang tidak sah atau kelalaian yang tidak disengaja. Ini menunjukkan bahwa islam sangat memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam muamalah.²⁴

Dalam praktik ekonomi kontemporer, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini menjadi relevan untuk diterapkan dalam sistem administrasi jual beli, terlebih pada sektor usaha yang melibatkan transaksi berulang atau pembayaran tempo. Ketika pelaku usaha, seperti rumah potong ayam atau pedagang bahan pokok, tidak memiliki pencatatan transaksi yang baik, maka resiko wanprestasi akan meningkat. Hal ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menyelisihi tuntutan syariat yang menghendaki adanya transparansi, tanggung jawab, dan pemenuhan hak-hak secara proporsional dalam muamalah antar manusia sebagaimana diajarkan dalam ayat ini.²⁵

B. *Bai' Istijrar*

1. Pengertian *Istijrar*

Istijrar dalam pengertian bahasa berarti menarik atau menyeret. Sementara itu, dalam istilah ilmu Fiqh, *Istijrar* merujuk pada pemenuhan kebutuhan secara bertahap dengan transaksi yang

²⁴ Muhammad Syafi'i Antoni, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2022), 115.

²⁵ Quraisy Shibab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan, dan Keserasian Dalam Al-Qur'an Vol. 2* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 675.

dilakukan di akhir.²⁶ Jadi jika disederhanakan pengertian *bai'istijrar* adalah pengambilan barang yang dilakukan secara berkala oleh konsumen yang pada pembayarannya dilakukan diakhir sesuai kesepakatan.

Bai' Istijrar termasuk satu dari berbagai bentuk perjanjian dalam transaksi jual beli, di mana penjual dan pembeli menyepakati penyediaan stok makanan atau barang dagangan lainnya secara berkelanjutan, baik secara harian, mingguan, maupun bulanan. Dalam perjanjian ini, harga serta metode pembayaran telah ditetapkan sejak awal.²⁷

Menurut Nuruddin Amanto, *Istijrar* adalah suatu proses transaksi antara penjual dan pembeli, di mana pembeli melaksanakan pembelian barang dengan berulang dalam jangka waktu tertentu. Dengan pengertian lainnya, *Istijrar* merupakan transaksi jual-beli yang pembayarannya dibayarkan secara bertahap atau diangsur.²⁸

2. Hukum *Bai' Istijrar*

Para ulama dibidang fiqh memiliki perbedaan pemahaman tentang hukum transaksi *Istijrar*. ketidaksamaan ini muncul karena dalam transaksi tersebut, pembeli tidak mendapat informasi tentang

²⁶ Abdullah al-Mushlih, "Jual Beli Yang Dipertebatkan," Desember 2024, accessed January 1, 2025, http://www.alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatekonomi&parent_id=46&idjudul=6§ion=e004.

²⁷ Soenarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 395.

²⁸ Nurudin Amanto, "Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi," Desember 2024, accessed January 1, 2025, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/download/313/297&ved=2ahUKEwjCxMXisYXvAhXNWisKHfZKDis4KBAWMAF6BAgGAEI&usg=AOvVaw2dNZnDIUkKVt7IJrlfzIPm>.

harga barang yang dibeli, bukan karena metode pembayarannya yang ditunda. Akibat dari perbedaan pemahaman ini, jika harga dalam transaksi sudah diketahui dengan pasti oleh pembeli, maka perdagangan tersebut dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Hal ini dikarenakan perdagangan semacam itu termasuk dalam kategori jual beli yang lazim ditetapkan dalam syariat Islam. Namun, perdebatan utama di antara para ahli Fiqh adalah terkait dengan kejelasan harga dalam transaksi tersebut.

Mazhab Hambali, berdasarkan sebuah riwayat, mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai harga dalam transaksi diperbolehkan dalam kaum mereka. Pemikiran ini diikuti oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Pendekatan ini didasarkan pada analogi dengan pernikahan, di mana akad tetap sah meskipun jumlah mahar tidak disebutkan secara spesifik, sebab biasanya pemberian besaran mahar tergantung adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Demikian pula, dalam transaksi jual beli, harga barang diselaraskan dengan harga umum yang berlaku. Salah satu alasan utama yang mendukung keabsahan akad semacam ini adalah karena praktik tersebut telah dikenal luas dan diterapkan di berbagai wilayah dan belahan dunia.

Menurut pemikiran Ibnul Qayyim dalam kitab *I'lamul Muwaqqi'in*, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status hukum kebolehan perdagangan tersebut disebabkan oleh penetapan harga yang tidak sesuai dengan perkiraan nilai barang yang sebenarnya pada saat akad berlangsung. misalnya penerapannya dapat ditemukan

dalam proses jual beli antara mitra bisnis, seperti tukang roti dan penyedia barang. Dalam transaksi ini, tukang roti mengambil barang terlebih dahulu, kemudian menghitung totalnya di awal bulan atau awal tahun sebelum akhirnya melakukan pembayaran. Sebagian ulama melarang praktik tersebut karena proses yang terjadi bukanlah proses serah terima yang sah dalam konteks kepemilikan, melainkan hanya sebatas serah terima (*Taqabudh*) yang dianggap tidak sah secara hukum.

Keadaan ini dianalogikan dengan serah terima barang rampasan, yang secara syariat dinilai tidak memenuhi syarat keabsahan transaksi. Oleh karena itu, praktik semacam ini dianggap rusak atau tidak valid menurut pandangan mereka. Karena pada dasarnya, serah terima dalam transaksi yang batal atau rusak juga mengalami cacat dalam pelaksanaannya. Namun, para pelaku tetap menjalankan transaksi tersebut karena tidak menemukan alternatif lain.

Meskipun terdapat fatwa yang melarang transaksi ini, bahkan mengkategorikannya sebagai transaksi yang bathil karena barang yang diperjualbelikan masih berada dalam kepemilikan penjual. Proses *Taqabudh*, yaitu penyerahan barang antara penjual dan pembeli, harus dilaksanakan dengan menggunakan ungkapan atau lafadz tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, transaksi yang dilakukan wajib memenuhi persyaratan terkait lafadz *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang disampaikan secara jelas dan sah antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Tanpa adanya kesepakatan melalui

lafadz ijab dan qabul yang sesuai, transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut ketentuan yang berlaku.

3. Syarat dan Ketentuan *Istijrar*

- a. Transaksi *Istijrar* dilakukan dengan barang yang masih menjadi milik penuh penjual (*Al-Milk At-Taam*), yang berarti hak kepemilikan tetap berada di tangan penjual hingga terjadi akad yang sah dengan pembeli. Konsekuensinya, segala risiko maupun keuntungan atas barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual sebelum berpindah kepemilikan kepada pembeli.
- b. Apabila penjual tidak memberikan informasi mengenai harga suatu produk, maka menjadi tanggung jawab pembeli untuk mengecek dan menentukan harga barang tersebut sesuai dengan nilai yang berlaku di pasaran. Pembeli dapat membandingkan harga dari berbagai sumber untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan harga yang wajar dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Selain itu, harga barang harus jelas, tetap, dan tidak berubah-ubah agar tidak terjadi perbedaan dalam transaksi jual beli dibandingkan dengan harga lainnya.
- c. Transaksi jual beli tetap dianggap sah meskipun pembeli tidak mengetahui harga barang sebelumnya dan bersedia menerima jumlah pembayaran yang ditetapkan pemilik barang. Namun, jumlah pembayaran harus sesuai dengan harga pasar, sebab jika

jumlah pembayaran yang ditentukan terlalu besar, dapat memicu perselisihan.²⁹

4. Macam-macam *Istijrar*

Istijrar terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Harga akan ditetapkan setelah seluruh transaksi jual beli selesai dilaksanakan.
- b. Harga telah disepakati pada awal akad dengan ketentuan bahwa proses jual beli serta metode pembayaran akan dilaksanakan secara bertahap atau berkala.

²⁹ Rahmatullah Albaweany, “Praktik Jual Beli Bahan Bangunan Dengan Sistem Pembayaran Tempo (*Istijrar*) Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (October 2, 2023): 125–126, accessed January 1, 2025, <http://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/perbankan>.